



VOKASI

Perpres Nomor 68
Tahun 2022
Revitalisasi
Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi



**MENUJU
ORKESTRASI
HARMONIS
AKSELERASI
PENDIDIKAN
VOKASI**

MENUJU ORKESTRASI HARMONIS AKSELERASI PENDIDIKAN VOKASI

Melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, transformasi dunia pendidikan vokasi diharapkan kian terakselerasi dengan penguatan kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan/pelatihan vokasi, dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Orkestrasi antarpemangku kepentingan pun semakin harmonis.



Pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada Selasa, 21 Februari 2023 lalu. Kehadiran Perpres ini pun disambut gem-pita oleh banyak pihak, tanpa terkecuali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Hadirnya Perpres Nomor 68 Tahun 2022 yang kita luncurkan pada hari ini, saya yakin transformasi dunia pendidikan vokasi akan semakin terakselerasi. Untuk itu, mari kita perkuat kolaborasi lintas lembaga dan lintas sektor, bersama-sama menciptakan SDM unggul melalui revitalisasi pendidikan vokasi,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, saat Peluncuran Perpres Nomor 68 Tahun 2022.



Nadiem Anwar Makarim, Mendikbudristek

RUANG LINGKUP PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2022

- Perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya.
- Penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, *link and match*, dan SMK Pusat Keunggulan.
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis *link and match* dan *dual system*.
- Penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, *future job*, *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*.



- Penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan.
- Peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Kadin, dan BNSP.

Perpres tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (PVPV) sendiri merupakan upaya pemerintah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Perpres No. 68 Tahun 2022 sekaligus menjadi perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Payung hukum terbaru ini tidak hanya akan mengatur revitalisasi SMK saja, tetapi juga mengatur seluruh satuan pendidikan vokasi, baik yang formal maupun nonformal.

Sebagai implementasinya, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah regulasi pendukung, yakni Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) PMK No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) serta Permenko PMK No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Vokasi.

Berbagai regulasi tersebut diharapkan akan menguatkan kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan/pelatihan vokasi dengan DUDI sehingga penyelenggaraan PVPV di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinasi. Keberadaan tim TKNV yang bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan juga diharapkan akan mem-

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI & KONFERENSI TVET NASIONAL
TAHUN 2023



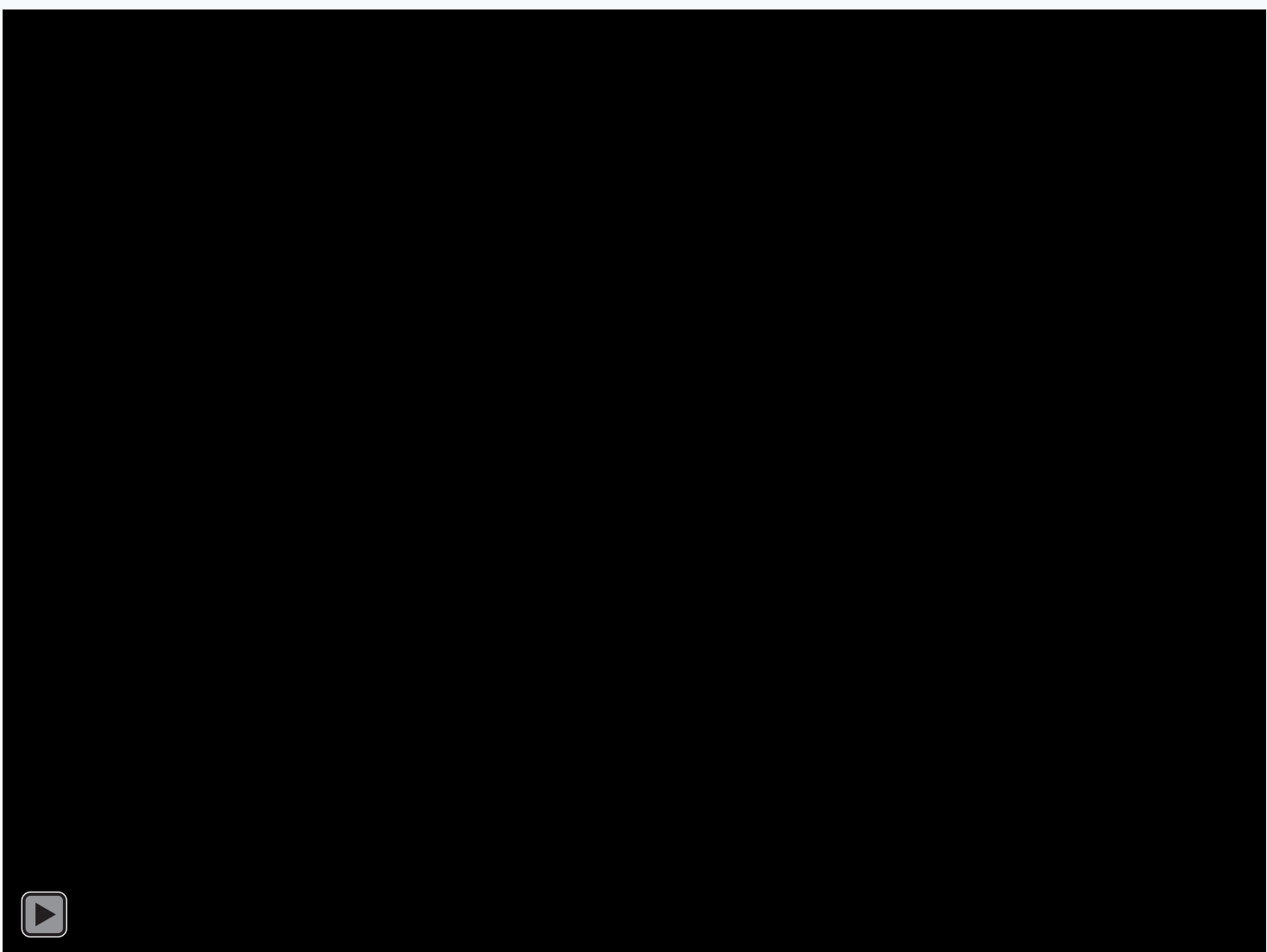
buat orkestrasi revitalisasi PVPV menjadi lebih terarah dan harmonis.

“Kemenko PMK akan terus melakukan orkestrasi berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan sehingga revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak berjalan-jalan sendiri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama Kemenko PMK, Warsito.

Urgensi Revitalisasi

Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya saat acara peluncuran Perpres No. 68 Tahun 2022 mengatakan bahwa sebagai tumpuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi sebuah keniscayaan. Urgensi untuk mengakselerasi pendidikan vokasi melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2022 sema-

PELUNCURAN REVITALISASI VOKASI OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO



Video bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Pro

atau bisa dibuka dengan tautan

<https://drive.google.com/file/d/1UPjXci5U-f028AVL7p5IN6PKShqI6R3I/view?usp=sharing>

kin nyata mengingat momentum bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada 2030 mendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2022 mencapai 143,72 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut diperkirakan akan terus bertambah sekitar 2,55 persen atau sekitar 3,5 juta setiap tahunnya seiring pertambahan penduduk. Pada puncaknya, jumlah angkatan kerja diperkirakan akan mencapai 71 persen dari jumlah penduduk yang diprediksi menyentuh angka lebih dari 290 juta jiwa di tahun 2030.

Selain itu, urgensi revitalisasi PVPV juga seiring dengan pembangunan infrastruktur dan pengembang kawa-



Saya ingin peluang-peluang kerja ini diisi oleh SDM yang memiliki keahlian yang tinggi dan cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.



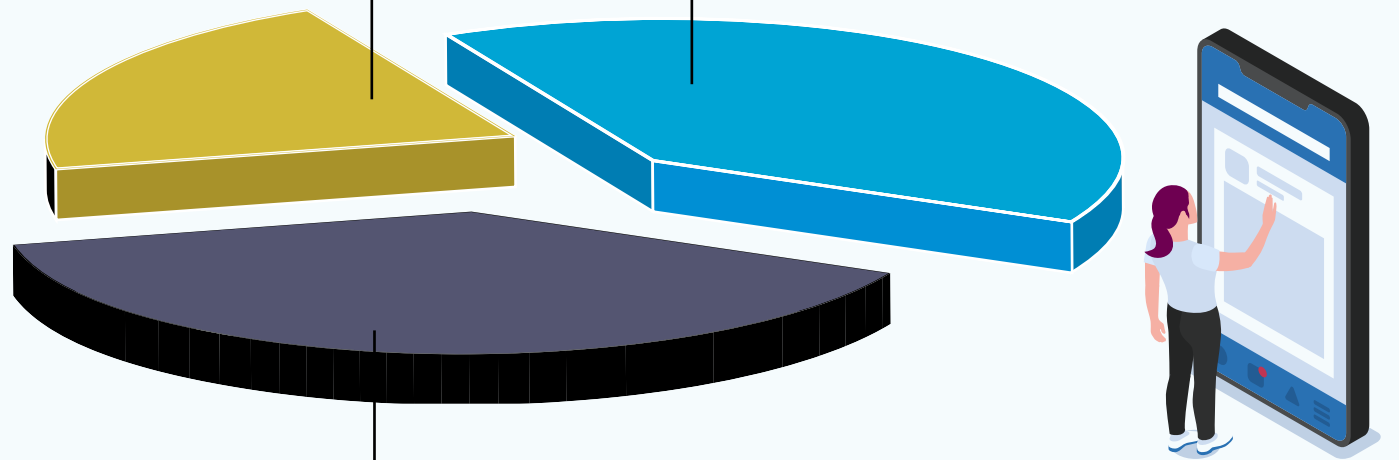
Joko Widodo, Presiden RI

POTRET ANAK MUDA DI INDONESIA

Jumlah generasi muda Indonesia pada
2021 mencapai **64,92 juta**
atau **23,90%** dari total populasi

20,87%
untuk usia
16-18 tahun

39,80%
pemuda
berusia
19-24 tahun



Berdasarkan
jenis kelamin,

50,91%
remaja adalah
laki-laki

39,33%
untuk usia 25-30 tahun



san ekonomi baru yang terus meningkat dalam tujuh tahun terakhir dan membutuhkan banyak tenaga kerja terampil. Mereka diperlukan untuk mengisi peluang-peluang kerja yang lahir dari momentum pertumbuhan infrastruktur dan pengembangan berbagai potensi di daerah tersebut.

Hingga tahun 2022, pemerintah setidaknya telah mengembangkan 19 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan menciptakan kawasan ekonomi baru di Indonesia.

Lebih terarah

Direktur Jendral Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, saat menjadi pembicara pada Konferensi Nasional PVPV menyampaikan bahwa banyak tantangan yang di-



Kiki Yuliati, Dirjen Pendidikan Vokasi (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara pada Konferensi Nasional PVPV

hadapi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Menurut Kiki, perkembangan teknologi dan digitalisasi serta revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan perubahan struktural pada dunia kerja. 80 persen pekerja akan digantikan dengan mesin canggih dan 50 persen akan menggunakan teknologi otomatisasi.

“Inilah mengapa revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Kita perlu upaya ekstra,” kata Dirjen Kiki.

Kiki menambahkan, Kemendikbudristek sebagai institusi garda depan yang melahirkan SDM unggul harus bertindak cepat dalam memanfaatkan momentum revitalisasi. Kemendikbudristek mengakselerasi transformasi pendidikan vokasi menjadi lebih terarah dengan orientasi pada kebermanfaatan/kewirausahaan dan kemitraan serta penyelarasan.

Paradigma pendidikan vokasi dari yang sebelumnya bersifat *supply-oriented* menjadi *demand-oriented* sehingga lulusan pendidikan vokasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Keunggulan spesifik lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi digali dengan lahirnya SMK Pusat Keunggulan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Kapal Pencalang. Kapal ini merupakan karya mahasiswa dan dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dalam program Revitalisasi Jalur Rempah dan dibiayai oleh program *Matching Fund*.

Akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi juga kian ditingkatkan dengan pelibatan partisipasi dunia kerja melalui sejumlah implementasi, seperti magang/praktik guru, penyusunan kurikulum bersama industri, kelas industri, hingga *project based learning* dengan proyek berasal dari industri.

“Semua dilakukan melalui berbagai skema pendanaan seperti *Matching Fund*, *Competitive Fund*, hibah, beasiswa industri, serta co-investasi dengan industri,” kata Dirjen Kiki.

Menurut Dirjen Kiki, sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk mentransformasi pendidikan vokasi mulai terlihat capaiannya. Hasilnya sudah bisa dilihat dan dirasakan saat ini.

Kemendikbudristek telah melakukan transformasi pada ribuan SMK melalui

program SMK Pusat Keunggulan. Jumlah SMK Pusat Keunggulan saat ini mencapai lebih dari 1.400 sekolah. Jumlah tersebut setidaknya telah mencapai sekitar 10 persen dari total SMK yang ada di Indonesia.

“Jumlah SMK negeri yang menjadi SMK PK adalah sekitar 51%, sedangkan SMK swasta sekitar 49%. Artinya, perhatian Kemendikbudristek untuk sekolah swasta tetap besar,” kata Dirjen Kiki.

Manfaat program SMK Pusat Keunggulan setidaknya sudah dirasakan oleh 2,8 juta siswa SMK di seluruh Indonesia. Program SMK Pusat Keunggulan juga dirasakan dampaknya oleh industri, sehingga pengembangan program SMK Pusat Keunggulan juga berhasil menarik minat investasi pendidikan dari entitas bisnis sebesar Rp439,25 miliar pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023, sudah ada total penawaran dari industri hampir



Rp2,3 triliun untuk mendukung SMK PK.

“Saat ini juga ada 5.556 SMK yang secara sukarela mengadopsi Kurikulum Merdeka agar kurikulumnya lentur dan mutakhir sesuai kebutuhan dunia kerja,” kata Dirjen Kiki.

Sebagai ujung tombak, Kemendikbudristek juga sudah meningkatkan kompetensi dan keahlian para guru dan dosen melalui *upskilling* dan *reskilling* terhadap lebih dari 22 ribu guru dan dosen. Mereka juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi dari industri.

Di level perguruan tinggi, setidaknya ada 456 ribu mahasiswa (termasuk mahasiswa vokasi) yang sudah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini memberikan pengalaman nyata di lapangan sebagai bekal kompetensi mereka memasuki dunia kerja masa depan.

Capaian lain juga ditunjukkan dari semakin banyaknya permintaan negara-negara sahabat untuk menyerap tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dari Indonesia. Contohnya pemerintah Namibia meminta Kemendikbudristek untuk memberikan bantuan konsultasi, beasiswa, bahan ajar, dan lainnya untuk membantu mengembangkan pendidikan vokasi di negaranya.

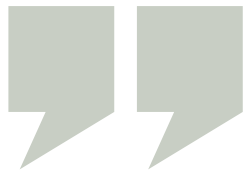
“Melalui pendidikan vokasi yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, Indonesia akan merasakan manfaat yang luar biasa dari bonus demografi yang akan datang dalam waktu dekat,” kata Dirjen Kiki.

Dukungan Kadin

Sementara itu, Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yuki Nugrahawan Hanafi, menyampaikan bahwa Perpres Nomor 68 Tahun 2022 akan sangat bermanfaat menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Menurut Yuki, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan rumah bagi dunia usaha akan terus berkomitmen untuk membantu membangun Sistem Pendidikan Vokasi yang lebih terintegrasi dan lebih berorientasi pada kebutuhan dunia industri di Indonesia.

Kadin sudah terlibat aktif dalam Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kadin melalui Kelompok Kerja Vokasi Kadin juga telah meluncurkan beberapa program, antara lain Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Magang



Kadin juga telah bekerja sama dengan IHK TRIER & GIZ Jerman untuk merancang dan merumuskan kualifikasi tenaga pengajar yang akan menjadi *in-company trainer* vokasi.



Yukki Nugrahawan Hanafi,

Koordinator Wakil Ketua Umum, Kamar Dagang Indonesia Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi

dan Rekrutmen Magang di Eropa yang menjadi realisasi kolaborasi Pemerintah dan Kadin Indonesia.

“Kadin juga telah bekerja sama dengan IHK TRIER & GIZ Jerman untuk merancang dan merumuskan kualifikasi tenaga pengajar yang akan menjadi *in-company trainer* vokasi,” kata Yukki.

Sebagai representasi privat sektor, Kadin sendiri berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam tiga hal, yakni mendukung orkestrasi dan memperbaiki aspek koordinasi antarlembaga. Melalui Tim Koordinasi Nasional, Kadin juga menjadi aktor utama dalam mengarahkan revitalisasi pendidikan dan pelatihan yang berorientasi permintaan, sebagaimana Strategi Nasional. Terakhir, Kadin berperan dalam melaksanakan inisiatif perbaikan instrumen vokasi di berbagai sisi dalam rangka akselerasi proses revitalisasi. ●



www.vokasi.kemdikbud.go.id

|   @KamiVokasi |   Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



SUSUNAN REDAKSI

PENGARAH Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Penanggung Jawab Cecep Somantri, Lismanto
Pimpinan Redaksi Nur Arifin **Redaktur Pelaksana**
Rina Yesicca Agustin **Editor/Penyunting** Febriani
Dyas Utami **Redaksi** Nanik Ismawati **Sekretariat**
Redaksi Habib Prastyo, Teguh Susanto, Dian Vita
Nugrahaeny **Desain Grafis** Dhoni Nurcahyo